

**KEBIJAKAN PERMAKAMAN SEBAGAI TANGGUNG
JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN WARGA
MISKIN**

**(Studi Kasus Kelurahan Sidodadi dan Pacar Keling
Surabaya)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam
Program Studi Magister Hukum Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

OLEH :

Tania Putri Anhary

02040422032

Dosen Pembimbing 1 :

Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag

NIP. 197306272000031000

Dosen Pembimbing 2 :

Dr. Khoirul Yahya, S.Ag., M.Si.

NIP. 197202062007101003

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : Tania Putri Anhary

Nim : 02040422032

Prodi : Magister Hukum Tata Negara

Judul Tesis : Kebijakan Permakanan Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam
Perlindungan Warga Miskin (Studi Kasus Kelurahan Sidodadi Dan Pacar
Keling Surabaya)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Desember 2023

Saya Yang Menyatakan



Tania Putri Anhary

02040422032

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Nama : Tania Putri Anhary
Nim : 02040422032
Prodi : Magister Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Kebijakan Permakanan Sebagai Tanggung Jawab Negara
Dalam Perlindungan Warga Miskin (Studi Kasus Kelurahan
Sidodadi Dan Pacar Keling Surabaya)

Tesis yang telah ditulis ini telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti ujian.

Surabaya, 15 Desember 2023

Dosen Pembimbing 1



Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M. Ag.

197306272000031000

Dosen Pembimbing 2



Dr. Khoirul Yahya, S.Ag., M.Si

197202062007101000

PENGESAHAN PENGUJI

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Tania Putri Anhary, NIM 02040422032 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqasah tesis UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program pascasarjana strata dua dalam prodi Magister Hukum Tata Negara.

Majelis Sidang Munaqasah:

Ketua Penguji

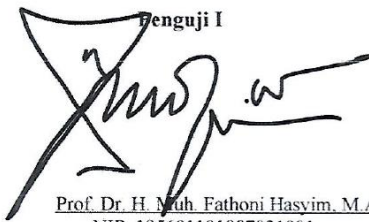


Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.
NIP. 197306272000031000

Sekretaris Penguji

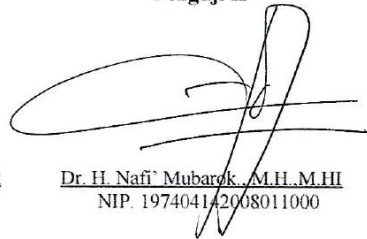


Dr. Khoirul Yahya, S.Ag., M.Si.
NIP. 197202062007101003



Prof. Dr. H. Muth Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji II



Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H., M.HI.
NIP. 197404142008011000

Surabaya, 23 Januari 2024
Mengesahkan,
Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Direktur Pascasarjana,



Prof. Nasdar Hilmy, M.Ag., Ph.D.
NIP. 197103021996031002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tania Putri Anhary
NIM : 02040422032
Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara
E-mail address : anharyputri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul : Kebijakan Permakanan Sebagai Tanggung Jawab Negara

Dalam Perlindungan Warga Miskin (Studi Kasus Kelurahan Sidodadi Dan Pacar Keling Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Desember 2023

Tania Putri Anhary

ABSTRAK

Tesis ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Kebijakan Permakanan Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Warga Miskin (Studi Kasus Kelurahan Sidodadi Dan Pacar Keling Surabaya)”. Tesis ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana Mekanisme Pendaftaran dan usulan bantuan Permakanan pemerintah kota surabaya bagi warga miskin sebagai tanggung jawab negara? dan 2. Bagaimana Monitoring dan evaluasi Kebijakan Penyaluran bantuan permakanan pemerintah kota surabaya bagi warga miskin Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Permakanan Di Kota Surabaya terhadap warga miskin sebagai tanggung jawab negara?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menerapkan teori Good Governance dan teori kebijakan publik. Dilakukan di Dinas Sosial Kota Surabaya dengan metode pendekatan sociological jurisprudence. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi penerapan E-Government dalam pelayanan publik dengan fokus pada aspek Good Governance di Kota Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan permakanan Dinas Sosial Kota Surabaya belum memenuhi peraturan yang berlaku, khususnya terkait mekanisme usulan pendaftaran. Ada ketidaksesuaian dengan Peraturan Walikota nomor 134 Tahun 2022 pasal 6, dimana usulan seharusnya dilakukan kepada lurah, tetapi dilaksanakan melalui kelompok masyarakat di kelurahan Sidodadi dan Pacar Keling. Hal ini menyebabkan kesalahan prosedur dalam pengajuan usulan dan tidak tercapainya tujuan kebijakan permakanan.

Selanjutnya, monitoring dan evaluasi yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Sosial, ternyata dilaksanakan oleh pokmas di kelurahan Sidodadi dan Pacar Keling. Tidak adanya mekanisme dari Dinas Sosial untuk memastikan pelaksanaan yang baik menunjukkan kurangnya transparansi dan kepastian hukum, sehingga aspek good governance belum terlaksana dengan baik.

Saran yang dapat diberikan adalah Dinas Sosial Kota Surabaya perlu membuat mekanisme dan kajian yang terbaru, dimulai dari sosialisasi pada masyarakat dan transparansi data untuk pelaksanaan mekanisme usulan. Selain itu, disarankan untuk melibatkan badan pengawas atau membuat kebijakan yang memastikan monitoring dan evaluasi kebijakan permakanan.

Kata Kunci : Permakanan, Good Governance, Kebijakan Publik

ABSTRACT

This thesis is the result of research with the title "Food Policy as a State Responsibility in Protecting the Poor (Case Study of Sidodadi and Pacar Keling Villages, Surabaya)". This thesis was written to answer questions outlined in two problem formulations, namely: 1. What is the registration mechanism and proposal for food assistance from the Surabaya city government for the poor as a state responsibility? and 2. How is the monitoring and evaluation of the Surabaya City Government's food aid distribution policy for the poor according to Surabaya Mayor Regulation Number 134 of 2022 concerning Guidelines for Providing Food in the City of Surabaya to the poor as a state responsibility?

This research uses empirical legal research by applying Good Governance theory and public policy theory. Carried out at the Surabaya City Social Service using a sociological jurisprudence approach. The aim of the research is to evaluate the application of E-Government in public services with a focus on aspects of Good Governance in the City of Surabaya.

The results of the research show that the food policy of the Surabaya City Social Service does not comply with applicable regulations, especially regarding the registration proposal mechanism. There is a discrepancy with Mayor Regulation number 134 of 2022 Article 6, where proposals should be made to the village head, but are implemented through community groups in the Sidodadi and Pacar Keling sub-districts. This causes procedural errors in submitting proposals and food policy objectives are not achieved.

Furthermore, monitoring and evaluation which should have been carried out by the Social Service, was actually carried out by the community groups in Sidodadi and Pacar Keling sub-districts. The absence of a mechanism from the Social Service to ensure good implementation shows a lack of transparency and legal certainty, so that aspects of good governance have not been implemented properly.

The advice that can be given is that the Surabaya City Social Service needs to create updated mechanisms and studies, starting from outreach to the community and data transparency for implementing the proposed mechanism. In addition, it is recommended to involve regulatory bodies or create policies that ensure monitoring and evaluation of food policies.

Keywords: Food, Good Governance, Public Policy

DAFTAR ISI

COVER DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kajian Pustaka	6
H. Kerangka Teoritik	12
I. Metode Penelitian	17
J. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KAJIAN TEORI	22
A. Kebijakan Publik.....	22

B. Good Governance	30
C. Muroqobah.....	35
D. Bantuan Permakanan	36
BAB III PENYAJIAN DATA	41
A. Gambaran Umum.....	41
1. Kelurahan Sidodadi.....	41
2. Kelurahan Pacar Keling	44
B. Kebijakan Bantuan Permakanan	48
BAB IV ANALISIS DATA.....	60
A. Kebijakan Permakanan Kota Surabaya.....	60
B. Implementasi Kebijakan Bantuan Permakanan Pemerintah Kota Surabaya Bagi Warga Miskin Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Permakanan Di Kota Surabaya Terhadap Warga Miskin Sebagai Tanggung Jawab Negara.	71
1. Mekanisme Usulan Pendaftaran Program Bantuan Permakanan. ..	71
2. Monitoring dan evaluasi Kebijakan Penyaluran bantuan permakanan pemerintah kota Surabaya bagi warga miskin Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Permakanan Di Kota Surabaya terhadap warga miskin sebagai tanggung jawab negara	91
BAB V	102
PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.....	38
Gambar 3.2.....	39
Gambar 3.3.....	40
Gambar 3.4.....	41
Gambar 3.5.....	43
Gambar 4.1	48

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, “*Pemkot Surabaya diminta cari solusi putusnya bantuan permakanan warga miskin*” [https:// jatim.antaranews.com/berita/674121/pemkot-surabaya-diminta-cari-solusi-putusnya-bantuan-permakanan-warga-miskin](https://jatim.antaranews.com/berita/674121/pemkot-surabaya-diminta-cari-solusi-putusnya-bantuan-permakanan-warga-miskin); diakses pada tanggal 28 Agustus 2023
- Abidin, Zaid Zainal, 2004. *Kebijakan Publik*, (EdisiRevisi). Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Achmad Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Indonesian Center for Civic Education (ICCE) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), hal. 198.
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah mada university press 2017), 1.
- Anderson, James E.1984. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- AO (2003) (Food and Agriculture Organization), *FAO Yearbook: Production*. Vol. 55, FAO, Rome, 164-166.
- Arifin Tahir. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaran*. Pemerintah Daerah. (Bandung: Alfa Beta, 2015), 1
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021*. Surabaya : Pemerintah Kota Surabaya. 2020. Bab II. 1
- Badan Pusat Statistik, *Kota Surabaya dalam Angka 2022*. Surabaya : Pemerintah Kota Surabaya, 76
- Cornellia Yulin Esther Dita dan Martinus Legowo, *Analisis Kepadatan Penduduk Yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan Dan Degradasi Lingkungan*, Ilmu Sosial FISH Universitas Negeri Surabaya, 04 Oktober 2022, 1

- di Kelurahan Semolowaru Surabaya. *Jurnal Bakti Saintek*, 4(2), (Desember,2020) 33
- Dilalatul Urfah, dkk, GAP Analysis Model Servqual Program Pemberian Permakanan Lansia di Kota Surabaya, *Jurnal Media Gizi Kesmas Universitas Airlangga*, Vol. 11, No. 2 (Desember, 2022) 535
- Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. 2020. Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Sosial RI
- Dunn, William N,2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dye, Thomas R. 2008. *Understanding Public Policy*, 12th Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*, 12th. Edition. (Upper Saddle River, NJ: Pearson. Education, 2008.) 15
- Edi Suharto, Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus disampaikan pada Focused Group Discussion (FGD) “Kajian Pelayanan Khusus pada Sektor Pelayanan Publik” (Bogor: Lembaga Administrasi Negara (LAN), 9-10 Oktober 2008), hal. 1.
- Eno Putri Larasati, Implementasi Program Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Sangat Miskin Dan Lanjut Usia Terlantar Di Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut Kota Surabaya (Skripsi - Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur, 2021) 148.
- Gupta, K. Dipak. (2001). *Analyzing Public Policy: Concept, Tool, adn Techiques*. Washington DC: Congressional Quarterfly Inc.
- Hartini Retnaningsih, “Prinsip Portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional,” *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 2 (2018).
- Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Erlangga :PT Gelora Aksara Pratama, 2010), 151.

Howell, T.A. (2001) Enhancing Water Use Efficiency in Irrigated Agriculture. *Agronomy Journal*, 93, 281-289. <https://doi.org/10.2134/agronj2001.932281x>

<https://www.jawapos.com/surabaya-raja/01419857/surabaya-raja-masuk-10-besar-pengangguran-tertinggi-di-jatim>

Ilvana Natalia Natarang. Kajian Yuridis Terhadap Penyimpangan Bantuan Sosial Desa Menurut Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VII/No. 10/Des/2018, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 76

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 70

iswanti, Arika Diyah. 2016. Peran Pendampingan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Program Pendampingan Keluarga Balita Gizi Buruk di Kecamatan Semampir Kota Surabaya). *Wacana*. Vol. 19 No. 03

J. Salusu. 2003. Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: Grasindo

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008)

Keban, Yeremias T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media

Laila Munfati, Evaluasi Program Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Miskin Dan Lanjut Usia Terlantar Di Kecamatan Pakal Kota Surabaya (Studi Kasus Kelurahan Pakal). (Skripsi – Universitas Wijaya Putra, 2019) 40

Laili Hariroh, *“Bantuan Permakanan Diberikan untuk Lansia Tunggal dan Disabilitas Tunggal”* [https:// kemensos.go.id/bantuan-permakanan-diberikan-untuk-lansia-tunggal-dan-disabilitas-tunggal](https://kemensos.go.id/bantuan-permakanan-diberikan-untuk-lansia-tunggal-dan-disabilitas-tunggal); diakses tanggal 28 Agustus 2023

Lasman Parulian Purba dkk, Peningkatan Kualitas Layanan Program pemberian Permakanaan Lanjut Usia

lham Arief Sirajuddin, “Implementasi Kebijakan Pemerintah daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makasar,” *Jurnal Administrasi Publik PPs UNM* 4, no. 1 (2014): 1-14.

M. Sholahuddin, “*Warga Surabaya Penerima Bantuan Permakanaan Berkurang, Dua Fraksi Geram*” <https://www.jawapos.com/surabaya-raja/01432190/warga-surabaya-penerima-bantuan-permakanaan-berkurang-dua-fraksi-geram>; diakses pada tanggal 28 Agustus 2023

M. Sholahuddin, “*Warga Surabaya Penerima Bantuan Permakanaan Berkurang, Dua Fraksi Geram*” <https://www.jawapos.com/surabaya-raja/01432190/warga-surabaya-penerima-bantuan-permakanaan-berkurang-dua-fraksi-geram>; diakses pada tanggal 28 Agustus 2023

Mulyadi, Deddy, 2016, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung, Alfabeta, Edisi Revisi.

Mulyadi, Deddy, 2016, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung, Alfabeta, Edisi Revisi.

Nur Azizah, “Kebijakan Pemerintah dan Good Governance”. Paper. (Yogyakarta: JPP Fisipol UGM, 13 September 2011), hal. 6.

Olsha Audry Nastiti, —Upaya pemerintah terhadap penanganan fakir miskin di era pandemi covid 19 perspektif fiqh siyasah studi di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 30

Pandji Santosa, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 130.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2

Rian Nugroho. D. 2009. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

- Rizal Ramadhan Ivandi dan Martinus Legowo, Rasionalitas Penerimaan Bantuan Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Menengah Kebawah Di Kota Surabaya, *Jurnal Unesa*, Vol. 11 Nomor 1. (Juli, 2022) 10
- Setijatingrum, E. (2017). Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di kota Surabaya. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 30(1), 13. <https://doi.org/10.20473/mkp.v30i12017.13-19>
- Supratini, D. A. *Di Balik Program Permakanan Milik Pemkot Surabaya*. Infosurabaya.Id. <https://infosurabaya.id/2018/10/31/di-balikprogram-permakanan-milik-pemkotsurabaya/>. Diakses 28 Agustus 2023.
- Syarifah Nikmah Dan Tjitjik Rahaju, Evaluasi Program Pemberian Permakanan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Surabaya, *Jurnal Publika*, Vol. 9 No. 3 (Mei, 2021) 205
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. Implementasi Kebijakan Publik. (Transformasi Pikiran George Edwards. Yogyakarta: Lukman Offset, 2003). 26
- Toha, Miftah. 2012. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)
- Utilisation of Monitoring and Evaluation Systems by Development Agencies, Zvhouse Hardlife, GideonZhou, American International Journal Contemporary Research, Volume.3 No.3 2013.

Undang – Undang

Pembukaan Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian
Permakanan Di Kota Surabaya
Peraturan walikota no 60 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Permakanan
Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Wawancara

Anisya Soefiantin, *wawancara*, Surabaya, 7 Agustus 2023.
Andreas Hanafi, *Wawancara*, Surabaya, 7 Agustus 2023.
Indra Fajar, wawancara 3 Oktober 2023
Miyati, wawancara 4 Oktober 2023
Atmina, Wawancara, 4 Oktober 2023
Rahmat, Wawancara 6 November 2023
Maropah, wawancara 6 November 2023
Musonah, wawancara 6 November 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A